

NO 045 TH KE-70
TERBIT 16 HAL Rp 3.000

SENIN KLIWON, 11 JANUARI 2016
30 MULUD 1949 JIMAWAL

HARIAN
BERNAS
Synergize
to Optimize

Belajar dari Birokrasi Paku Alaman

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh: Heri Priyatmoko

DALAM Domein verklaring ditentukan pula maksimal seperlima luas tanah desa tetap dikuasai oleh desa untuk lungguh (gaji) lurah desa dan pamong desa, kepentingan umum, dan pengaremb-arem (pensiun) bekel yang tidak memperoleh tempat di kalurahan selepas reorganisasi agraria. Pengaremb-arem diberikan scumur hidup dan sebagai ganti rugi bagi mereka karena kehilangan jabatannya. Domein verklaring memuat wewenang PA memakai sebagian tanah desa untuk kepentingan perusahaan perkebunan, dan ini sudah berdasarkan peraturan Grondhuur. Tahun 1931 penduduk desa diperbolehkan menggadaikan tanah ke bank supaya memperoleh kredit (crediet-verband) karena

sudah ada regulasinya. Pemerintah desa diberi wewenang membuat aturan agar penduduk desa maupun dari luar jangan memperoleh tanah desa terlalu luas.

Menjual atau menggadaikan tanah hak pakai di desa dilakukan selepas memperoleh persetujuan rapat desa. Bila tidak demikian, penjualan dan penghutangan tanah tidak sah. Dilarang menjual atau menyerahkan hak milik dan hak pakai atas tanah desa kepada orang nonpribumi atau mereka yang bukan rakyat Paku Alaman, juga menyewakan atau meminjamkan tanah desa untuk kepentingan perkebunan. Diatur pula bab penyewaan atau peminjaman tanah yang tidak dikuasai Paku Alaman kepada orang asing untuk kepentingan pertanian dan tindakan lainnya terkait hak-hak atas tanah. Segala perubahan dari areal tanah yang disewakan ke

perusahaan perkebunan harus dilakukan dengan keputusan Paku Alam. Gouvernements Besluit 10 April 1918 No. 26 mengatur pemberian "Zakelijke rechten" (umumnya hak opstal) atas tanah kerajaan kepada mereka yang bukan rakyat kerajaan, termasuk ganti rugi yang dibayarkan ke istana.

Tahun 1921 dikeluarkan ketentuan mencegah penyalahgunaan tanah domein oleh rakyat di luar kerajaan. Di samping itu, diatur pemberian tanah kepada orang asing yang kurang atau tidak mampu. Pembukaan tanah (ontginning) dituangkan dalam verordening tahun 1912 yang dimuat dalam Rijksblad Paku Alaman tahun 1918. Rijksblad ini mengatur suatu desa dapat diberi izin membuka tanah domein (tanah kerajaan). Jika izin telah diberikan kepada suatu desa, maka desa ini berhak atas tanah tersebut

(communaal bezit atau hak milik kolektif). Desa itu juga berwenang menentukan siapa dari penduduk desa yang diberi hak memakai tanah itu secara turun temurun.

Demikianlah potret birokrasi Paku Alaman yang tersusun rapi serta sanggup menjalankan roda pemerintahan. Suatu negara tanpa birokrasi, jelas tak akan berjalan. Diatur bukan dalam pengertian dihambat, melainkan supaya tata kehidupan berjalan tertib. Kritik historis bagi pemerintahan Indonesia dewasa ini ialah bobroknya budaya birokrasi. Pemahaman umum bahwa rakyatlah yang harus melayani para aparatur pemerintahan, bukan yang dilayani. Bila ingin urusan lancar lainnya "jalan tol", tak sedikit dari kita membayaruang rokok. Tampaknya kita perlu belajar dari Paku Alaman. ***

Heri Priyatmoko, Dosen
Sejarah, Fakultas Sastra,
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta